

MEMAKNAI KELAS MENENGAH MUSLIM SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK INDONESIA

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
email: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Abstract: *This article aims at analyzing agenda of socio-political changes among Indonesian middle class muslim. Compared with other middle class groups, middle class muslim is a middle class which tends to have political sense toward political changes. It is caused by its political experiences they have got such as alienation, authoritarianism, and inequality. Those ironic experiences make Indonesian middle class become political agent. Political experiences which have happened in middle east such as Turkey, Iran, and Egypt become main preferention to analyze current situation. Therea are two prominent perspectives to see socio-political changes which are addressed to Indonesian middle class muslim: post Islamism and Islam populism. The first perspective, political changes is synergically based on mutual cooperation between Islam, democracy, and liberalism. On the other hand, the second one, revolution is placed as the main strategy of affirmative political change done by middle class. More specifically, Islamist ideology rejects religious modernity and seeks to oppose Islam against secular, pluralistic and liberal understandings of the “emancipated self” and the democratic public sphere. Those both perspectives are then used to analyze case of Indonesian middle class muslims. This article will elaborate more deeply to analyze socio-political changes among Indonesian middle class muslims.*

المخلص: هذا الكتاب يحصل ليتخذ الفرق في الثقافة والسياسية على الفن المتوسط للمسلمين الاندونسي اختلافًا بالفن المتوسط الاخرى. الفن المتوسط للمسلمين كان فنًا متوسطًا سياسيًا على اختلاف السياسية. ذلك الفصل يشمل بكون السياسية المحصول كمثل رأي الناس. ويشمل ايضا هذا الكتاب يتخذ على المعاشرة بالمعروف. كثرة حال السائريصير فنًا متوسطًا للمسلمين للدلالة السياسية. السياسية في كون مثل المعاشرة في العرب، كمثل مصرى، تركى، عبر اختيار الاولى للتخاذ الفرق على الثقافة السياسية في ذلك المكان. اما الاول رايان في نظر فرق ثقافة السياسية. بعاملت فن متوسط المسلمين. وهو بعد الاسلامية

والاسلامية الذي نصر المستضعفين. الرأي الاول، يحصل على الحضارة و دموكراتية و الحرية. الرأي الثاني، يحصل على التغيير بطريق الاول من تغيير السياسية تأكيداً يعمل على الفن المتوسط. رأيان يستقبل ليتخذ فن المسلمين في اندنسي. هذا الكتاب يصير في تغيير ثقافة السياسية على فن متوسط المسلمين في اندنسي.

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis agenda perubahan sosial politik bagi kelas menengah muslim Indonesia. Dibandingkan dengan kelas menengah lainnya, kelas menengah muslim adalah kelas menengah yang politis terhadap perubahan politik. Hal tersebut terkait dengan adanya pengalaman politis yang dialami seperti halnya alienasi, otoritarianisme, maupun juga ketimpangan. Berbagai kondisi satir itulah yang menjadikan kelas menengah muslim tampil sebagai agen politik. Pengalaman politik seperti yang terjadi dalam kasus masyarakat Timur Tengah seperti Mesir, Turki, dan Iran menjadi preferensi utama dalam menganalisis perubahan sosial politik yang ada. Terdapat dua perspektif penting dalam melihat agenda perubahan sosial politik yang dialamatkan oleh kelas menengah muslim yakni post-Islamisme dan Islam populisme. Perspektif pertama lebih mengandalkan adanya sinergi antara Islam, demokrasi, dan liberalisme. Perspektif kedua lebih mendudukan revolusi sebagai jalan utama perubahan politik afirmatif yang dilakukan oleh kelas menengah. Kedua perspektif itulah yang kemudian dilihat dalam menganalisis kasus kelas menengah muslim Indonesia. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih dalam mengenai agenda perubahan sosial politik dalam kelas menengah muslim Indonesia.*

Keywords: kelas menengah, muslim Indonesia, perubahan sosial-politik, gerakan politik.

PENDAHULUAN

Terminologi kelas menengah muslim Indonesia merupakan kajian baru dalam kajian politik Indonesia pasca Orde Baru. Kajian para *scholar* khususnya yang menganalisis tentang relasi politik dan Islam di Indonesia terletak pada 8 sub kajian yakni 1) radikalisme islam, 2) kesalehan sosial, 3) sosialisasi islam, 4) gender dan islam,

5) Islam dan demokrasi, 6) islam dan sekulerisme.¹ Namun tidak ada yang membahas secara terperinci mengenai kelas menengah muslim itu sendiri.

Kurangnya pembahasan mengenai kelas menengah muslim di Indonesia berkelindan dengan fluktuasi hubungan negara-masyarakat yang terjadi pada paska Orde Baru maupun paska desentralisasi. Adapun dalam masa paska Orde Baru, umat muslim masih berupaya untuk mencari bentuk yang pas dalam membangun kembali sebagai *ummah* setelah sekian lama teralineaasi negara. Sedangkan dalam masa paska desentralisasi, munculnya gejala syariatisasi di aras lokal memunculkan adanya gelombang konservatisme islam dalam masyarakat yang justru menampilkan Islam secara eksklusif dan eklektik.

Masyarakat kelas menengah muslim Indonesia hadir paska 1998 yang sebelumnya sudah ditandai dengan munculnya berbagai macam produk-produk Islami seperti halnya koran *Republika*, *Bank Muamalat*, maupun jenis produk syariah lainnya. Tampilnya kelas menengah Islam pada paska 1998 hingga kini menampilkan cita dan citra kelas menengah yang adaptif dengan negara. Islam menjadi identitas yang bisa dinegosiasikan dengan negara seraya masih mempertahankan identitas muslim mereka.²

Pembangunan masyarakat kelas menengah muslim Indonesia memiliki similaritas dengan pembangunan masyarakat muslim yang terjadi di Turki maupun juga Mesir. Kedua negara tersebut memiliki pengalaman terbentuknya kelas menengah muslim yang dilahirkan paska rezim otoritarianisme maupun juga *developmentalisme*. Kasus politik kelas menengah muslim yang terjadi dalam kasus di kedua negara tersebut menyebutkan bahwa modernisasi Islam yang dilangsungkan melalui model “*Tarbiyah*” menjadi kunci kelas menengah muslim tampil sebagai agen perubahan sosial politik di kedua negara tersebut. Kelas menengah muslim Indonesia sebenarnya mengikuti pola perkembangan pembangunan kelas menengah di kedua negara tersebut. Namun hanya saja,

¹Kurniawati Dewi, *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia* (Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015).

²Wasisto Raharjo Jati, “Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim Terhadap Genealogi Kelas Menengah Muslim Di Indonesia,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2015): 23.

transformasi kelas menengah muslim menjadi agensi perubahan sosial-politik yang tidak terjadi dalam kasus Indonesia. Oleh karena itulah, penting untuk melihat studi komparasi pembangunan kelas menengah muslim di ketiga negara tersebut, yakni Indonesia, Mesir, maupun Turki. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai pola perkembangan politik kelas menengah muslim dalam konteks kekinian.

POST-ISLAMISME DAN ISLAM POPULISME SEBAGAI DASAR KELAS MENENGAH MUSLIM

Alienasi terhadap muslim, rezim otoritarianisme, maupun juga ketimpangan ekonomi-politik menjadi sumber pemicu penting munculnya kelas menengah muslim. Hal yang perlu diingat adalah kelas menengah muslim sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok kelas menengah pada umumnya. Kelas menengah merupakan kelas masyarakat baru yang menampilkan sisi rasionalitas, material, maupun intelektualitas dari adanya kehidupan perekonomian yang semakin baik. Namun demikian, identitas sebagai muslim inilah yang membedakannya dengan kelas menengah pada umumnya dibentuk dan dipelihara oleh negara. Kelas menengah muslim terbentuk karena proses negosiasi dan adaptasi untuk menempatkan diri dalam relasi negara-masyarakat. Kebutuhan akan rekognisi dan representasi menjadi kelas adalah hal yang urgen dan signifikan, disamping tetap mempertahankan adanya identitas sebagai muslim.

Sekularisasi dan Demokrasi merupakan tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah muslim dalam upaya meneguhkan posisinya dalam relasi negara-masyarakat paska otoritarianisme. Kedua hal itulah yang penting untuk dinegosiasikan dan diafirmasi oleh kelas menengah muslim untuk mereduksi pandangan publik yang skeptis terhadap Islam. Adanya semangat post-islamisme dan juga kesalehan sosial merupakan strategi kunci dalam menginisiasi munculnya kelas menengah muslim. Pemahaman Post-Islamisme diinisiasi oleh Asef Bayat dalam bukunya *Post-Islamism: Many Changes of Political Islam* untuk melihat perubahan signifikan dalam masyarakat muslim paska revolusi seperti yang terjadi dalam studi kasus Mesir, Turki, Tunisia, maupun Indonesia.

Berbeda halnya dengan Islamisme yang menekankan adanya ideologi kolektif komunitas dalam memformalisasikan agama sebagai aturan sehingga berdampak pada pembentukan negara. Post-islamisme menekankan pada adaptasi Islam dengan sekularisme, liberalisasi, dan demokrasi.³ Ideologi ini lebih menawarkan adanya religiositas Islam dalam ruang publik sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Adanya perubahan orientasi Islam tersebut tidak terlepas dari dua pengaruh baik secara internal maupun eksternal. Dari segi internal, masyarakat muslim kini lebih terbuka terhadap berbagai ide liberalisme, sekularisme, maupun juga demokrasi tanpa harus menanggalkan identitas Islamnya. Kebebasan dan independensi merupakan kebutuhan esensial yang diperlukan oleh masyarakat muslim paska revolusi politik. Sedangkan dari eksternal, adanya berbagai macam aksi terorisme dan radikalisme yang mengatasnamakan islam di berbagai penjuru dunia malah justru semakin menyudutkan nama Islam itu sendiri.

Tumbuhnya post-islamisme sendiri merupakan bagian dari bentuk kebangkitan umat Islam setelah selama ini terpenjara dalam adanya rezim otoritarian maupun juga rezim teokrasi yang justru menjadikan masyarakat Islam justru teralienasi. Kondisi itulah yang kemudian berusaha untuk diubah dengan munculnya kelas menengah muslim yang tumbuh dari kelas-kelas intelektual maupun utamanya borjuasi kecil (*petty buorguises*). Resistensi terhadap otoritarianisme dilawan dengan cara konstitusional yakni dengan mendirikan partai dan mengikuti pemilu sehingga membentuk pemerintahan. Resistensi terhadap teokrasi dilakukan dengan cara lebih menerapkan religiositas dalam ruang publik sehingga menciptakan Islam yang inklusif. Catatan penting untuk dicermati adalah munculnya *tarbiyah* dan *ikhwanisme* sebagai agensi perubahan sosial yang ditawarkan oleh kelas menengah muslim tersebut. Tarbiyah secara harfiah dapat diartikan sebagai pendidikan, yakni usaha untuk menciptakan semangat intelektualisme, modernisasi, maupun kesadaran politik dari kelas menengah. Sedangkan ikhwanisme merupakan bentuk militansi politik yang mengedepankan kolektivitas komunitas baik berbasis gerakan maupun intelektualitas.

³Asef Bayat, *Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam* (Oxford: OUP USA, 2013), 8.

Partai-partai yang dibentuk kelas menengah muslim pun bermunculan seperti halnya Ikhwanul Muslimin (Mesir), AKP (Turki), Ennahda (Tunisia), maupun juga PKS (Indonesia) merupakan bagian dari bentuk dari semangat post-islamisme tersebut. Ekspresi islam tidaklah perlu dilakukan dengan cara membentuk negara, namun cukup bagaimana Islam secara terbuka diterapkan oleh umatnya. Pandangan lain mengenai post-islamisme sebagai basis pembentuk masyarakat kelas menengah muslim datang dari kajian Peter Mandaville berjudul *Toward Post-Islamism*. Kelas menengah yang terlahir dari proses post-islamisme merupakan bentuk dari implikasi modernisasi yang menggejala masyarakat kelas menengah muslim justru mengarahkan kepada bentuk privatisasi kesalehan maupun juga sekulerisasi.⁴ Dengan kata lain, kelas menengah muslim menampilkan wajah masyarakat muslim yang mencoba menempatkan Islam sebagai politik identitas, dan tidak menggunakannya sebagai aktivisme politik secara spartan

Kemunculan Islam populisme dapat dilihat dari dua hal, yakni: 1) perkembangan industrialisasi dan kapitalisme yang tidak seimbang. Kehidupan perekonomian sendiri secara tidak berpihak pada masyarakat kelas menengah muslim, namun justru pada kelas borjuasi yang didominasi kepentingan Barat maupun juga Tionghoa. 2) rezim pemerintahan yang otoriter telah memberangus kehidupan masyarakat dengan menciptakan prinsip monoyalitas terhadap rezim. Kedua kondisi itulah yang melatabelakangi hadirnya politik islam sebagai bentuk ketimpangan kelas dan politik yang dialami oleh kelas menengah muslim selama ini. Dalam penjelasan Hadiz, Islam populis juga merupakan bentuk respons terhadap kontradiksi pembangunan kapitalisme yang selama ini mengalienasikan masyarakat kelas menengah muslim.⁵ Hal itulah kemudian menciptakan adanya usaha untuk mempopulerkan islam sebagai identitas politik kolektif yang ditujukan sebagai alat perjuangan politik (*political struggle*). Diskursus mengenai politik islam tersebut kemudian diperkuat legitimasi secara teologis bahwa keterbelakangan umat Islam dikarenakan adanya dominasi ekonomi-politik Barat yang menindas sehingga perlu untuk dilawan.

⁴Peter Mandaville, *Islam and Politics* (London: Routledge, 2014), 371.

⁵Vedi Hadiz, *Political Islam in Post-Authoritarian Indonesia* (University of Oxford Oxford: Center for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, 2010), 4-8.

Dari situlah soliditas maupun solidaritas masyarakat muslim kelas menengah menjadi kunci penting dalam membangkitkan semangat *ummah* dalam level global.

Perspektif islam populisme menempatkan dimensi keadilan sosial (*social justice*) sebagai basis penting dalam membangkitkan identitas kelas menengah. Maka dalam perkembangan selanjutnya, Islam populisme kemudian bercabang dalam dua haluan utama, yakni kebutuhan akan membentuk negara Islam (*darul islam*) dan membentuk masyarakat muslim (*ummah*). Pada model islam populisme klasik, alienasi terhadap masyarakat muslim tersebut ditunjukkan dengan cara defensif, yakni mendirikan suatu negara atau komunitas kolektif yang mewajibkan umat islam tergabung di dalamnya.⁶ Urgensi terbentuknya negara Islam tersebut merupakan jawab sah atas ketimpangan kelas yang dialami oleh kelas menengah muslim tersebut. Dengan mendirikan negara Islam, maka keadilan sosial yang menjadi esensi dasar islam populisme akan tercapai dengan mudah. Hal itulah mendasari adanya perlawanan bersenjata cenderung mengarahkan pada ekstrimisme maupun radikalisme. Namun strategi tersebut tidak berhasil untuk diterapkan secara sepenuhnya.

Terminologi musim semi Arab pada dasarnya merupakan istilah yang menggambarkan mengenai perubahan radikal dari authoritarianisme menuju demokrasi yang terjadi di Arab. Dimulai dari kisah martir di Tunisia mengenai aksi pembakaran diri sebagai bentuk protes terhadap rezim otoritarianisme yang berkuasa. Aksi itu menyulut protes yang dilakukan oleh kelas menengah di seantero Arab lainnya. Meskipun demikian, aksi radikalisme kelas menengah tersebut kemudian tidak berlaku masif. Arah ke depan justru menunjukkan bahwa perubahan sosial politik dari musim semi Arab yang lebih menonjolkan adanya radikalisme kini mulai mengarahkan pada aksi adaptasi dan negosiasi terhadap demokrasi dan liberalisme. Secara garis besar pembabakan garis perubahan sosial politik yang terjadi dalam Islam Populisme maupun Post-Islamisme dapat dijelaskan dalam tabulasi sebagai berikut.

⁶Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 51–52.

Tabel 1: Komparasi Islam Populisme dan Post-Islamisme

No	Parameter Perubahan Sosial-Politik	Islam Populisme	Post-Islamisme
1	Tujuan Perubahan Sosial-Politik	Eksistensi dan Representasi Kelas Menengah Muslim sebagai <i>ummah</i>	Adaptasi dan Negosiasi Kelas Menengah Muslim dalam Demokrasi, Liberalisme, dan Sekulerisme
2	Genealogi Perubahan Sosial Politik	Ketimpangan dan Alinerasi Kelas	Otoritarianisme
3	Cara Mencapai Perubahan Sosial Politik	Membentuk Gerakan Politik	Membentuk Partai Politik
4	Ciri Perubahan Sosial Politik	Perubahan Radikal	Perubahan Transformatif
5	Arah Perubahan Sosial Politik	Membentuk Masyarakat Muslim kolektif	Membentuk Kesalehan Sosial dalam Masyarakat
6	Relasi dengan Negara	Negara dipandang dalam relasi konfliktual	Negara dipandang dalam relasi Kolegial
5	Segmentasi Kelas Menengah	Kalangan borjuasi, intelektual, birokrat.	Intelektual, rumah tangga, birokrat

Sumber: diolah dari berbagai data.

PERUBAHAN SOSIAL – POLITIK DALAM ISLAM POPULISME

Pengertian Islam Populisme secara sederhana dapat diartikan sebagai Islam yang merakyat. Pengertian tersebut sebenarnya merupakan bagian dari dua fenomena penting, yakni: 1) adanya upaya untuk menginkluskikan Islam sebagai agama publik karena Islam selama ini menjadi agama eksklusif bagi segelintir orang. Agama bukannya sebagai pengikat kebersamaan, namun justru menjadi alat penindas untuk melanggengkan adanya legitimasi kekuasaan dengan menghasilkan adanya rezim. 2) Islam sebagai identitas pembebasan untuk melawan ketimpangan dan ketertindasan yang

selama ini terjadi. Hal itulah yang kemudian mendorong terjadinya gerakan politik dengan membawa Islam sebagai identitas kolektif. Kedua penyebab munculnya Islam populisme itulah berimplikasi penting terhadap pilihan strategi perubahan sosial-politik yang akan digunakan. Pengertian lain mengenai Islam populisme adalah Islam pembebasan. Istilah ini merupakan padanan kata yang terinspirasi semangat teologi pembebasan yang berkembang dalam kasus Amerika Selatan. Pembebasan tersebut terkait dengan upaya membebaskan kemiskinan maupun ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

Islam populisme secara harfiah dapat diartikan sebagai usaha untuk mempopulerkan Islam dalam skala luas. Namun berbeda dengan istilah Islam populer yang lebih cenderung mempopulerkan Islam ruang publik dalam bentuk produk budaya populer. Istilah populisme yang disematkan dalam Islam merupakan bagian dari upaya menunjukkan eksistensi sekaligus pula koeksistensi diri dengan komunitas masyarakat lainnya. Eksistensi itu memang berakar pada masalah ketimpangan dan alienasi kelas yang terjadi karena akumulasi kapital yang tidak adil. Kondisi tersebut mendorong adanya pergolakan kelas yang cukup massif untuk melawan rezim otoritarianisme. Oleh karena itulah, gerakan populisme sebenarnya merupakan bagian dari gerakan kiri baru yang melanda kelas menengah muslim. Perspektif kiri ditempatkan sebagai bentuk usaha penyadaran politik bahwa kemunduran kelas menengah muslim sebagai *ummah* adalah ketiadaan akses dan redistribusi ekonomi yang tidak adil. Hal itulah yang kemudian mendorong adanya semangat pembebasan untuk melawan hal tersebut.

Premis penting yang perlu dicatat dalam membahas Islam populisme di Turki tersebut adalah kebangkitan kelas menengah yang didominasi oleh kalangan pedagang kecil (*petty buorguises*) yang selama ini dianggap sebagai kalangan tertindas oleh rezim selama pembangunan ekonomi maupun industrialisasi Masyarakat muslim terutama yang diinisiasi oleh kelas menengah muslim yang termajinalkan. Timpang secara ekonomi dan ketiadaan akses dalam mengakses kapital merupakan kunci penting timbulnya populisme Islam. Secara garis besar, Islam Populisme sendiri memiliki kesamaan karakteristik dengan teologi pembebasan maupun neo-

sosialisme yang berlangsung di Amerika Latin.⁷ Kebebasan dari ketertindasan maupun redistribusi ekonomi yang merata merupakan misi utama dalam pengalaman Latin tersebut. Hal itulah yang kemudian menciptakan adanya gerakan kiri baru yang didukung oleh gereja sebagai landasan teologis dalam menumbangkan ketimpangan dan alineasi tersebut. Kelas menengah yang dimotori oleh kalangan intelektual, borjuasi kecil, maupun rumah tangga menjadi motor utamanya.

PERUBAHAN SOSIAL–POLITIK DALAM POST-ISLAMISME

Berbeda dengan Islam populisme yang mengarahkan kepada perubahan sosial-politik yang mengarahkan kepada aksi kekuasaan dan gerakan konfliktual. Post-Islamisme lebih menyarankan adanya perubahan sosial politik dimulai dari pembentukan ruang publik. Ruang publik tersebut ditujukan untuk sebagai ruang negosiasi, ruang diskusi, maupun ruang adaptasi. Hal tersebut sebenarnya selaras dengan tujuan Post-Islamisme yakni untuk mengintegrasikan tataran demokrasi, liberalisme, dan Islamisme dalam satu ruang.

Namun hal tersebut masih bisa menjadi perdebatan lantaran pasca 9/11, trend Islam populisme kemudian mengalami penguatan identitas, terlebih lagi dengan adanya radikalisme agama yang kemudian mendorong adanya aksi ekstrimisme justru mengarahkan pada terbentuknya negara Islam sebagai solusi. Perubahan yang diinginkan dalam Islam populisme adalah membangun masyarakat muslim terintegrasi dengan komunitas masyarakat lainnya. Hal tersebut sebenarnya untuk menepis adanya anggapan adanya Islam yang dianggap sebagai Islam yang eklektik. Semangat mendirikan masyarakat muslim itu merupakan bagian dari proses revivalisme kelas menengah muslim pasca otoritarianisme. Ekspresi identitas tetap diperlukan seraya membutuhkan platform kuat untuk mempertahankan identitas tersebut seraya menghormati adanya komunitas masyarakat lainnya. Oleh karena itulah, demokrasi kemudian dipilih sebagai basis perubahan sosial politik tersebut menciptakan adanya terminologi muslim demokrat. Munculnya istilah muslim demokrat sendiri juga bagian dari perkembangan

⁷Wasisto Raharjo Jati, "AGAMA DAN POLITIK: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama," *WALISONGO* 22, no. 1 (2014): 133–156.

intelektualisme kelas menengah muslim bahwa perubahan sosial politik kini tidak lagi mengandalkan hanya sekedar pada aksi gerakan fisik, namun lebih mengarahkan pada gerakan intelektual. Dengan kata lain, perubahan sosial politik dimulai dengan cara edukasi yang mengajarkan akan pentingnya nilai demokrasi dan Islam.

Ruang publik dilihat sebagai sarana tepat dalam menciptakan muslim demokrat tersebut di kalangan kelas menengah muslim. Kebutuhan ruang publik tersebut meningkat seiring dengan kebutuhan kelas menengah untuk menunjukkan ekspresi dan artikulasi identitas yang mereka inginkan. Munculnya kelompok diskusi seperti halnya Paramadina, Maarif, dan lain sebagainya merupakan bagian dari proses post-islamisme tersebut. Pesan perubahan sosial politik yang disampaikan oleh Islam Populisme dengan menitikberatkan pada masyarakat muslim tersebut terletak pada dua hal yakni, 1) kelas menengah sebagai *ummah* dapat menjadi agen transformasi Islam dan demokrasi 2) kelas menengah dapat menjadi pen jembatan antara Islam konservatif dan Islam modernis yang selama ini bertentangan. Dimulai dari adanya diskusi di kafe kemudian merambah pada tingkatan universitas merupakan salah satu tujuan dari diseminasi pemikiran tersebut. Tantangan perubahan sosial yang ditawarkan oleh Islam populisme ini adalah konflik kekerasan dan menjaga situasi bina damai. Kedua hal tersebut merupakan fenomena yang terjadi dalam kondisi paska otoritarianisme yakni adanya eskalasi kepentingan yang tidak dipenuhi. Meskipun itu bisa dikategorisasikan sebagai pertentangan kelas, namun adanya kekerasan lebih karena ekspresi identitas yang kurang. Maka, kelas menengah muslim sebenarnya dalam ruang konfliktual tersebut antara kebutuhan eksistensi dan adaptasi sebagai muslim. Maka jika dikomparasikan secara lebih lanjut antara Islam Populisme dan Post-Islamisme sebagai agen perubahan sosial politik maka dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2: Posisi Kelas Menengah Muslim sebagai Agen Perubahan

No	Faktor Perubahan	Islam Populisme	Posisi Kelas Menengah Muslim	Post Islamisme	Posisi Kelas Menengah Muslim
1	Strukturasi Masyarakat	Strukturasi merupakan Ketimpangan Kelas	Kelas Menengah tampil sebagai inisiator gerakan kontra revolusi	Strukturasi merupakan Relasi Elitisme dan Otoritarianisme	Gerakan ditampilkan dengan menawarkan demokrasi
2	Reformasi Agama,	Agama dimaknai dalam dua hal yakni sarana penindas dan sarana pembebas	Agama bagi Kelas Menengah perlu dilihat sebagai agama sipil yang instrumen-tatif	Agama jangan dilihat sebagai sesuatu konservatif, namun dinamis	Agama bagi kelas menengah dilihat sebagai dasar untuk mensinergiskan demokrasi dan liberalisme
3	Relasi dengan Negara	Negara adalah arena pertentangan kepentingan	Kelas Menengah merupakan bagian gerakan massal dalam kontestasi kepentingan tersebut	Negara adalah mitra dalam melakukan perubahan sosial	Kelas Menengah berupaya menjadikan demokrasi sebagai jalan utama membentuk pemerintahan.

Sumber: diolah dari berbagai data

PENGALAMAN KASUS KOMPARASI KELAS MENENGAH MUSLIM INDONESIA

Munculnya kelas menengah muslim di Indonesia dapat dilacak dari munculnya relasi kelompok borjuasi dan intelektual dalam masyarakat muslim untuk bangkit melawan ketidakadilan terhadap mereka. Adanya marjinalisasi dan alienasi terhadap kelompok muslim yang kasusnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan dunia Islam lainnya menimbulkan adanya kebangkitan dan solidaritas bersama.⁸ Kasus kebangkitan kelas menengah muslim Indonesia dapat dilihat dari berbagai fase mulai dari perjuangan politik hingga perjuangan eksistensi diri dan juga mulai dari isu khilafah Islamiyah menuju Islam populer. Dengan kata lain bahwa kelompok kelas menengah muslim di Indonesia sendiri menginginkan adanya ruang-ruang ekspresi sehingga nilai-nilai Islam kemudian populer di kalangan masyarakat.⁹ Oleh karena itulah, baik Islam populisme maupun post-islamisme yang menjadi rujukan kelas menengah muslim Indonesia dalam melakukan perubahan. Hal itu dijalankan secara signifikan dalam melakukan perubahan politik.

Kemunculan kelas menengah muslim Indonesia sebagai agen perubahan sosial-politik sebenarnya dapat dilacak dari pertengahan tahun 1994 dengan munculnya ICMI sebagai pionir perubahan sosial. Selain ICMI, pionir gerakan kelas menengah muslim lainnya bisa dilacak dari munculnya Forum Demokrasi yang diinisiasi oleh Abdurrahman Wahid bertujuan untuk membina persatuan antar umat dan juga menghindari adanya sektarianisme yang digagas oleh Pemerintah Orde Baru.¹⁰ Adapun di luar dua kelompok itu sebenarnya masih ada kelompok gerakan kelas menengah muslim lainnya seperti halnya kelas menengah muslim yang terlahir dari kelompok Islam progresif, kelompok Islam liberal, maupun Islam garis keras yang kemudian melihat rezim otoritarianisme sebagai musuh bersama dan demokrasi sebagai agenda utama (*the only game in a town*).

⁸Jati, "Tinjauan Perspektif Intelektual Muslim Terhadap Genealogi Kelas Menengah Muslim di Indonesia."

⁹Wasisto Raharjo Jati, "Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2015): 139–163.

¹⁰Greg Barton, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2003), 227.

Beragamnya latar belakang kelas menengah muslim tersebut merupakan implikasi penting dari sosialisasi islam sebagai agama maupun identitas yang kemudian melakukan komodifikasi terhadap Islam. Islam dianggap politis untuk mengkaitkannya dengan revivalisme kelas menengah terutama kalangan kritis karena Islam dianggap sebagai agama populis dan Islam sebagai entitas yang emosional. Hal tersebut dikarenakan Islam sudah melebur menjadi agama sipil bagi masyarakat sehingga nilai norma masyarakat Indonesia sudah dipengaruhi nilai-nilai Islam.

Transisi demokrasi yang menempatkan rezim otoritarianisme sebagai musuh bersama merupakan bagian dari konstruksi perubahan sosial politik bagi kelas menengah muslim. Namun demikian, narasi penting yang perlu dicatat adalah “demokrasi” menjadi basis penting dalam penyampaian agenda perubahan lainnya yang muncul “dari aspirasi kelas menengah muslim Indonesia. Dengan kata lain, “demokrasi” menjadi payung besar terhadap perubahan sosial politik yang diusung oleh kelas menengah muslim. Adapun seperti halnya post-Islamisme maupun juga Islam populisme yang menjadi perspektif komparatif dalam kajian ini, revivalisme kelas menengah muslim Indonesia juag tidak terlepas dari kerangka dua perspektif besar tersebut.

Ditinjau dari perspektif post-populisme, kemunculan kelas menengah muslim Indonesia bisa dilacak dari munculnya golongan intelektualisme yang baru pulang belajar dari luar negeri. Dari situlah kemudian memicu adanya semangat intelektualisme kritis di antara kelas menengah muslim dalam merumuskan adanya perubahan sosial-politik di Indonesia. Negara tujuan belajar memberikan andil dalam merumuskan strategi perubahan sosial politik di Indonesia karena itu merupakan bagian dari penerapan studi komparatif mengenai *sharing* kemungkinan untuk diterapkan di Indonesia. Tercatat ada tiga mazhab negara yang menjadi dasar pemikiran perubahan sosial politik kelas menengah Indonesia, yakni Timur Tengah (Mesir, Arab Saudi, Iran), Barat (Amerika Serikat), dan Turki.

Perubahan sosial politik yang ditawarkan bagi kalangan kelas menengah terinspirasi Timur Tengah adalah purifikasi ajaran Islam yang kemudian mengkristal menjadi dua hal, yakni masyarakat muslim dan negara Islam. Munculnya kedua gagasan tersebut sebenarnya mewakili persaingan geopolitik bagi masyarakat kelas

menengah yang berada kawasan Teluk. Seperti yang telah disebut di awal, kelas menengah yang menginginkan adanya negara muslim adalah mereka yang teguh terhadap jalur teokrasi dan negara kesejahteraan versi muslim. Adapun bagi kelas menengah muslim yang terinspirasi perubahan sosial politik dari Amerika Serikat akan menjadikan Islam sebagai agama sipil dengan memadukan perspektif liberalisme, komunitarian, dan HAM sebagai analisis penting. Bagi mereka, bentuk negara Indonesia sebagai republik sudah final dan kini akan lebih untuk menata bentuk masyarakat seraya saling menjaga kepentingan dan privasi masing-masing. Hal tersebut sebenarnya selaras dengan pengalaman kelas menengah Amerika Serikat dalam membangun masyarakat sipil paska revolusi kemerdekaan. Akan lebih baik menjaga cita-cita demokrasi dengan menguatkan masyarakat sipilnya terlebih dahulu.

Adanya kedua kutub pemahaman berbeda dari deskripsi post-populisme yang menggejala di kalangan kelas menengah muslim Indonesia tersebut menjadikan arah perubahan sosial politik yang ditawarkan kemudian berorientasi pada pembangunan Islam inklusif. Namun demikian ada juga yang mengartikannya bahwa perubahan sosial-politik yang diusung oleh kelas menengah muslim Indonesia adalah bagian dari upaya radikalisme Islam sebagai ideologi dan falsafah hidup yang kemudian terlegitimasi dalam tindakan separatisme maupun juga terorisme. Radikalisme tersebut sebenarnya merupakan respons terhadap adanya ruang kuasa negara yang hilang dalam mengontrol masyarakat sehingga terjadilah pertarungan antar ideologi untuk menjadi yang terdepan dalam artikulasi kepentingan. Oleh karena itulah, Islam kemudian tersulut untuk menjadikan dirinya sebagai tuan di negeri sendiri. Adanya resurgensi dan resistensi yang dilakukan oleh kelas menengah muslim terutama meradikalkan Islam adalah respons dari adanya ketimpangan dan alienasi kelas. Dalam bidang perekonomian, kelas menengah muslim sendiri sendiri mengalami kekalahan sumber daya ekonomi dengan para konglomerat Tionghoa. Adapun dalam bidang politik, kelas menengah muslim menghadapi kenyataan adanya dominasi kalangan nasionalis-Jawa dalam pemerintahan.

Oleh karena itulah, kelas menengah muslim kemudian terdorong untuk melakukan adanya radikalisme gerakan yang bertujuan untuk menumbangkan dominasi tersebut. Hal itulah yang kemudian

memicu adanya militansi dan militerisasi sipil dalam kalangan kelas menengah untuk meruntuhkan hegemoni tersebut. Berbagai organisasi kelas menengah muslim pun bermunculan sebagai respons atas ketimpangan dan hegemoni tersebut. Sebenarnya tujuan awal terbentuknya berbagai macam organisasi tersebut pada dasarnya untuk membangun adanya kolektivitas kelompok dan juga media dikawah secara komunal. Namun justru hal itu malah melembagakan diri dalam bentuk sikap *xenophobia* yang dialamatkan oleh kelas menengah muslim terhadap kalangan masyarakat lainnya. Maka yang justru menimbulkan segregasi dan eksklusifitas kelas menengah muslim tersebut.

Adanya dua arah pandangan yang berbeda terhadap agenda perubahan sosial politik yang diusung dalam masa transisi demokrasi itulah yang menjadikan posisi kelas menengah muslim menjadi gamang dalam melihat “demokrasi”. Pengalaman adanya ketimpangan dan alienasi kelas yang dialami selama ini memberikan implikasi terhadap kesatuan kelas menengah muslim Indonesia. Prens penting yang perlu dicatat dalam menganalisis gerakan politik kelas menengah muslim berdasarkan pada dua narasi penting yakni. 1) Populisme kurang begitu mengakar dalam kelas menengah muslim Indonesia kontemporer dikarenakan agenda “kiri-progresif” masih belum begitu menguat di akar rumput masyarakat. Selain halnya masih adanya stigmatisasi komunis yang masih mengakar dalam masyarakat. Selain itu juga masih adanya kesiapan dalam diri masyarakat untuk menerima perubahan secara radikal. 2) Meskipun demokrasi, liberalisme, dan sekulerisme kini mulai diterima oleh kelas menengah muslim sebagai upaya negosiasi dan adaptasi. Namun dalam beberapa hal, syariatisme juga berjalan di akar rumput sebagai upaya meneguhkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan kata lain, derajat post-Islamisme dalam kelas menengah tidaklah mengarahkan secara utuh dalam mengaplikasikan sekulerisme secara nyata seperti dalam kasus Turki. Akan tetapi lebih mengarahkan pada terbentuknya komoditisasi nilai-nilai dalam Islam dalam budaya populer. Hal itu juga merupakan bentuk resolusi damai yang diusung oleh kelas menengah muslim untuk menghindari adanya konflik yang lebih luas dalam masa transisi demokrasi.

Masa transisi demokrasi selama kurun waktu 1999-2004 diwarnai adanya perubahan drastis dalam kontur gerakan politik kelas menengah muslim Indonesia. Pelaksanaan pemilu langsung yang menghasilkan adanya dominasi kalangan nasionalis menjadikan kelas menengah muslim perlu melakukan negosiasi ulang terhadap perubahan politik. Hal itulah yang kemudian mendorong gerakan politik ekstra-parlementer di luar kekuasaan oleh berbagai macam organisasi kelas menengah muslim. Implikasinya kemudian memunculkan adanya legalisasi adanya perda syariah di kalangan akar rumput. Momentum adanya legalisasi perda syariah sendiri merupakan bagian dari wacana perubahan politik yang dilaksanakan oleh kelas menengah muslim terutama mereka yang menganut paham *hard-liner* untuk segera melegalkan adanya syariah, meskipun dalam lingkup kecil. Adapun bagi kelompok kalangan kelas menengah muslim yang konsisten pada jalur “lunak” malah justru semakin lunak terhadap perubahan politik dan makin apatis terhadap gerakan politik. Masih kuatnya sigma terorisme tersebut menjadikan legalisasi perda syariah sebagai jalan terakhir dalam perubahan politik kurang begitu Mereka pada umumnya telah menjelma kelas menengah muslim seperti pada era kekinian yang lebih menjaga hubungan dependen dengan kekuasaan daripada melakukan perubahan politik.

Adanya transformasi kelas menengah muslim kini lebih beraktivitas dalam komoditisasi simbol dan perilaku daripada melakukan perubahan politik merupakan implikasi dari sebuah “adopsi” terhadap modernisasi. Kelas menengah muslim Indonesia adalah merupakan kelas menengah yang dinamis dalam dinamika zaman seraya tetap memegang nilai-nilai Islam sebagai mendasar. Agenda mendesak dalam perubahan sosial-politik bagi kelas menengah muslim Indonesia adalah menjaga hubungan bina damai dengan kelompok kelas menengah lainnya baik lintas agama maupun lintas kepentingan. Agenda tersebut sebenarnya lebih mendesak untuk semakin mempopulerkan Islam sebagai jalan pemersatu *umat* di Indonesia. Selain menjaga kondisi hubungan bina damai, langkah lain yang perlu dilihat adalah menekan adanya radikalisasi Islam dalam kalangan kelas menengah muslim Indonesia yang fluktuatif. Oleh karena itulah diperlukan adanya peran serta untuk menjaga suasana bina damai tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah

membangun kohesivitas politik antar kelas menengah agar suasana iklim kondusif senantiasa terjaga.

PENUTUP

Perubahan politik yang ditawarkan oleh kedua perspektif tersebut baik Islam populisme maupun juga post-Islamisme pada dasarnya ingin membawa kebangkitan Islam untuk menjadi lebih baik paska adanya alienasi dan otoritarianisme. Kelas menengah muslim merupakan proponent penting dalam membangkitkan kesadaran kelas tersebut. Berangkat dari pengalaman sama, namun berbeda dalam pemilihan strategi dalam melakukan perubahan sosial politik. Perspektif Islam populisme cenderung untuk melakukan perubahan sosial politik secara progresif yang cenderung konfliktual, sedangkan perspektif post-islamisme lebih kuat dalam membangun wacana pemikiran perubahan sosial politik.

Pengalaman pembangunan kelas menengah muslim di Timur Tengah senantiasa menjadi rujukan penting dalam agenda perubahan sosial politik untuk kelas menengah muslim Indonesia. Namun penting untuk dicatat bahwa analisis komparasi terhadap dua watak kelas menengah tersebut perlu disadari. Adanya dua pengalaman penting yakni adanya masa transisi dan masa paska transisi menjadi pelajaran penting bagi kelas menengah muslim Indonesia. Dari situ kemudian, terciptalah adanya kegamangan perubahan politik yang hendak dan ingin dicapai oleh kelas menengah muslim Indonesia. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan landasan mendasar bagi kelompok kelas menengah muslim Indonesia dalam melakukan perubahan. Namun hal itu kemudian bercabang dalam pemilihan strategi yang bermacam pula. Pada akhirnya kemudian mengkristalkan diri kepada terbentuknya Islam inklusif bagi kelas menengah muslim Indonesia yakni sebagai upaya membentuk ruang publik baru kelas menengah Indonesia secara komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2003.
- Bayat, Asef. *Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam*. Oxford: OUP USA, 2013.
- Dewi, Kurniawati. *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia*. Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015.
- Hadiz, Vedi. *Political Islam in Post-Authoritarian Indonesia*. Center for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, University of Oxford Oxford, 2010.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Jati, Wasisto Raharjo. "AGAMA DAN POLITIK: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama." *WALISONGO* 22, no. 1 (2014): 133–156.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2015): 139–163.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim Terhadap Genealogi Kelas Menengah Muslim Di Indonesia." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2015): 1–29.
- Mandaville, Peter. *Islam and Politics*. London: Routledge, 2014.

